

DIPIMPIN PLT DIRUT, HUTANG RSUD MAJENE MAKIN BENGGAK DAN PICU KRISIS OBAT



detikcom

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene kini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang cukup untuk melayani masyarakat. Kekurangan pasokan obat-obatan sempat mengharuskan pihak RSUD untuk meminjam dari rumah sakit lain. Bahkan masalah ini menjadi isu utama dalam pertemuan Dewan Pengawas BLUD RSUD Majene dengan pihak manajemen rumah sakit yang diadakan pada 19 Agustus 2024.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah utang obat-obatan yang belum dibayar, sehingga penyedia atau distributor obat tidak dapat lagi memenuhi pesanan baru. Situasi ini memaksa RSUD Majene untuk meminjam obat-obatan dari rumah sakit lain demi memastikan bahwa pelayanan kepada pasien tetap berjalan, meskipun dengan keterbatasan pasokan.

Dewan Pengawas BLUD menekankan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat kebutuhan obat-obatan dan BMHP di RSUD Majene yang sangat besar. Berdasarkan perencanaan anggaran tahun 2024, RSUD Majene memerlukan dana sekitar Rp12 miliar untuk memenuhi kebutuhan obat dan BMHP. Namun, dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit, hanya dialokasikan sekitar Rp6,6 miliar, yang jelas tidak cukup.

Menyikapi masalah ini, Ketua Dewan Pengawas Kasman Kabil, melalui surat nomor : 05/DP-BLUD/VIII/2024, perihal tindak lanjut pertemuan dewan pengawas, memberikan sejumlah rekomendasi penting. Salah satunya adalah segera melakukan pergeseran anggaran dalam RBA agar manajemen rumah sakit bisa menyelesaikan utang yang menumpuk dan memastikan bahwa pemesanan obat-obatan dari penyedia dapat dilayani kembali. Pergeseran anggaran diminta untuk segera dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan obat yang sangat mendesak.

Selain itu, Dewan Pengawas juga menekankan pentingnya agar pihak manajemen menyusun usulan perubahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan dana dalam

pengadaan obat-obatan dan BMHP, serta memperhitungkan utang tahun 2023 yang belum dilunasi. Pihak manajemen rumah sakit juga diharapkan untuk memperbaiki perencanaan logistik dengan menganggarkan secara lebih efisien berdasarkan skala prioritas, sehingga kebutuhan operasional rumah sakit dapat terpenuhi tanpa menambah utang baru.

Dengan langkah-langkah ini, Dewan Pengawas berharap bahwa RSUD Majene dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai rumah sakit pemerintah yang memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, tanpa terkendala oleh masalah keuangan yang mengganggu. Sayangnya, setelah peralihan posisi direktur RSUD Majene pada akhir November 2024 kepada Plt Direktur RSUD Majene, dr. Musadri Amir Abdullah, jumlah utang obat makin membengkak. Dari Rp 12 miliar menjadi Rp 16 miliar, atau diduga terjadi penambahan utang sekira Rp 4 miliar dalam tiga bulan kepemimpinannya, periode Desember (2024) – Januari – Februari (2025).

Sebelumnya diberitakan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan. Hutang obat rumah sakit ini dilaporkan mencapai Rp 16 miliar, sebuah angka yang cukup besar dan berdampak langsung pada layanan kesehatan bagi masyarakat. Kabar ini dikonfirmasi oleh Plt Direktur RSUD Majene, dr. Musadri Amir Abdullah, atau yang akrab disapa dr. Aco. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat, 28 Februari 2025. Ia membenarkan bahwa hasil laporan sementara yang direviu oleh inspektorat menunjukkan angka tersebut.

Akibat utang yang menumpuk, sejumlah vendor obat memilih untuk menunda atau bahkan menghentikan suplai obat ke RSUD Majene. Imbasnya, pada akhir tahun 2024, banyak pasien dan keluarganya harus merogoh kocek sendiri untuk membeli obat di apotek luar rumah sakit. Meski demikian, dr. Aco memastikan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan penggantian biaya pembelian obat bagi pasien yang terdampak.

Guna mengatasi persoalan ini, pihak RSUD Majene akan menerapkan berbagai langkah efisiensi, terutama dalam penggunaan obat. dr. Aco menegaskan bahwa pemberian obat akan lebih selektif, disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang sifatnya mendesak.

Saat ditanya mengenai ketersediaan vendor yang bersedia kembali menyuplai obat ke RSUD Majene, dr. Aco mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada beberapa yang bersedia bekerja sama, meskipun belum sepenuhnya normal. Ia menambahkan bahwa untuk itu sementara belum semua, karena sekarang harus kami hitung kemampuan RS dan berdasarkan yang tadi urgent dan penting.

Meskipun tantangan besar masih membayangi, pihak RSUD Majene tetap optimis bahwa masalah ini bisa terselesaikan. dr. Aco menargetkan seluruh hutang obat bisa lunas paling lambat tahun 2026. Dengan berbagai langkah efisiensi yang diterapkan,

diharapkan RSUD Majene dapat kembali beroperasi secara optimal dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat tanpa terkendala masalah finansial.

Sumber berita:

1. <https://kilassulbar.id/dipimpin-plt-dirut-hutang-rsud-majene-makin-bengkak-dan-picu-krisis-obat/>, Dipimpin Plt Dirut, Hutang RSUD Majene Makin Bengkak dan Picu Krisis Obat, 2 Maret 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/03/03/utang-capai-16-miliar-vendor-stop-suplay-obat-ke-rus-majene>, Utang Capai 16 Miliar, Vendor Stop Suplay Obat ke RUS Majene, 3 Maret 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, pada Pasal 86 disebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Utang/pinjaman tersebut berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
2. Berdasarkan Pasal 87 Peraturan tersebut, maka Utang/pinjaman jangka pendek tersebut merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek tersebut merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan. Utang/pinjaman jangka pendek tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman. Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek tersebut menjadi tanggung jawab BLUD. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
3. Sesuai Pasal 89 Peraturan tersebut, Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Utang/pinjaman jangka panjang tersebut hanya untuk pengeluaran belanja modal. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang tersebut merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.